

Article

Analisis Konstruktivisme: Perilaku Korea Utara terhadap Denuklirisasi

Inda Mustika Permata¹

¹ Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received : 25 January 2019
Final Revision : 01 May 2019
Available Online : 30 November 2019

KEYWORD

North Korea, Norm, Denuclearization, Nuclear, Identity, Self-defense, Rival

KATA KUNCI

Korea Utara, Norm, Denuklirisasi, Nuklir, Identitas, Pertahanan diri, Rival

CORRESPONDENCE

E-mail : indamustikapermata@soc.unand.ac.id

ABSTRACT

This paper explains about changes in North Korea's attitude regarding its commitment to stop developing the nuclear weapon program. It began with a ballistic missile test in 2017, which received a rejection from China, South Korea, and the United States. As of April 2018, the Panmunjom Declaration was signed between North and South Korea, followed by a meeting about denuclearization between the United States and North Korea in June 2018. However, five months later, IAEA reported that North Korea still continuing its program. Qualitative methods and constructivism approach are used in explaining the behavior of North Korea. The defect of North Korea's commitment was caused by identity differences between North Korea and other actors in the region, constructing relationships that were perceived as rivals and self-defense interest concept.

ABSTRAK

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan perubahan sikap Korea Utara terkait komitmennya dalam menghentikan program senjata nuklir. Dimulai dengan uji coba misil balistik pada tahun 2017, menuai beragam penolakan dari Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Hingga pada April 2018, ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom antara Korea Utara dan Korea Selatan, diiringi dengan diadakannya pertemuan Amerika Serikat dan Korea Utara pada Juni 2018 tentang denuklirisasi Korea Utara. Namun, lima bulan kemudian, IAEA melaporkan bahwa Korea Utara ternyata masih melanjutkan proram nuklirnya. Metode kualitatif dan pendekatan konstruktivisme digunakan dalam menjelaskan perilaku Korea Utara. Mangkirnya Korea Utara dari komitmennya disebabkan karena perbedaan identitas antara Korea utara dengan aktor lainnya di kawasan yang membentuk hubungan yang dipersepsikan sebagai rival dan kepentingan untuk mempertahankan diri.

Pendahuluan

Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh non-negara pemilik nuklir selalu menyita perhatian dunia internasional. Sebut saja Iran dan Pakistan yang mendapatkan respon kurang baik bagi negara pemilik nuklir, seperti Amerika Serikat. Terlebih, baru-baru ini, dunia dihebohkan dengan pengembangan misil balistik antar benua Korea Utara yang dapat menjangkau Alaska, semua wilayah Asia Tenggara, dan Australia. Uji coba terhadap misil balistik ini dilakukan Korea Utara sebanyak dua kali pada tahun 2017. Pada September 2017, Korea Utara melakukan uji coba bom hidrogen yang dapat ditempelkan pada hulu ledak rudal balistik tersebut, akibatnya terjadi gempa dengan kekuatan 6.3 SR.¹

Dengan daya jangkau yang luas, tentunya kemampuan Korea Utara dalam pengembangan nuklir tidak boleh diremehkan. Aktivitas Korea Utara tersebut direspon keras oleh Amerika Serikat melalui Penasehat Keamanan Nasionalnya, H.R. McMaster, bahwa akan ada opsi militer yang dilakukan dalam merespon ancaman terhadap Amerika Serikat.² Bila merujuk pada tulisan Galucci, ada dua ancaman yang muncul dengan aktivitas Korea Utara tersebut. Pertama, ancaman terhadap kestabilan di kawasan, karena menurut Galucci, Korea Selatan dan Jepang akan bereaksi terhadap perkembangan program senjata nuklir Korea Utara dengan melepaskan status sebagai negara non-nuklir dan kemudian mengembangkan

senjata nuklir mereka sendiri, mengingat Korea Selatan dan Jepang telah memiliki pembangkit energi nuklir yang sewaktu-waktu dapat dikonversikan menjadi senjata nuklir. Kedua, menurut Galucci, ancaman berimbas langsung kepada Amerika Serikat, karena jika Korea Utara memiliki senjata nuklir, tentunya penempatan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara.³ Hal ini tentunya akan meningkatkan pengeluaran terkait peningkatan senjata serta pembiayaan banyaknya pasukan militer. Terlebih dilihat dari jumlah uranium dan plutonium, analisis memperkirakan Korea Utara memiliki 13-21 senjata nuklir.⁴

Dengan ancaman nyata tersebut, Amerika Serikat tidak akan toleran terhadap aktivitas nuklir Korea Utara sehingga memunculkan pendapat ahli tentang kemungkinan terjadinya perang diantara Amerika Serikat dan Korea Utara.⁵ Namun, peristiwa mengejutkan terjadi pada bulan April 2018, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, menyatakan komitmennya untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea pada pertemuan yang dilakukan di Panmunjom. Diikuti pada bulan Juni 2018, ketika Presiden Donald Trump dan Pemimpin Kim Jong Un bertemu di Singapura untuk membicarakan denuklirisasi secara penuh yang akan dilakukan oleh Korea Utara.

Pertemuan ini tentunya memberikan harapan tentang menguatnya kesepakatan

¹ OkeNews, "Uji Coba Bom Hidrogen Korut Mengakibatkan Gempa 6,3 SR," Edisi 3 September 2017, <<https://news.okezone.com/read/2017/09/03/18/1768439/uji-coba-bom-hidrogen-korut-mengakibatkan-gempa-6-3-sr>>, diakses pada 4 Maret 2019

² CNN, "Latest North Korea Missile Test Renews US Talk of Military Option," Edisi 16 September 2017, <<https://edition.cnn.com/2017/09/16/politics/north-korea-missile-test/index.html>>, diakses pada 4 Agustus 2018.

³ Robert L. Gallucci, "North Korea, Iran, and the Proliferation of Nuclear Weapons: The Threat, U.S. Policy, and the Prescription ... and the India Deal," ed. Stephen Van Evera (Cambridge, MA: The Tobin Project, 2006), 23-24.

⁴ John.K. Warden, "North Korea's Nuclear Posture An Evolving Challenge for US Deterrence," Proliferation Papers, Ifri, Maret 2017, 15.

⁵ Hitoshi Tanaka, "Five Factors That Could Lead to War with North Korea," East Asia Insights, September 2017, 1-4.

denuklirisasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Namun, pada November 2018, IAEA melaporkan bahwa Korea Utara masih mengembangkan program nuklirnya.⁶ Hal ini tentu mengejutkan, mengingat dalam beberapa bulan perilaku Korea Utara berkomitmen secara penuh untuk mengakhiri program nuklirnya. Paparan di atas memperlihatkan bahwa perubahan sikap Korea Utara dapat berimplikasi tidak hanya terhadap Amerika Serikat, tetapi juga kawasan.

Terkait perilaku Korea Utara tersebut, sudah banyak para ahli yang membahas tentang topik tersebut. T. Roehrig misalnya, ia menjelaskan bahwa Korea Utara mengembangkan nuklir untuk mempertahankan keberlangsungan rezim Kim.⁷ Hal ini menjadi penting menurut Mun Suk Ahn karena adanya krisis ekonomi yang terjadi di Korea Utara disaat pemerintahan yang tidak stabil.⁸ Di samping itu, Sung Chull Kim menjelaskan bahwa Korea Utara melihat peluang bahwa dengan mengembangkan nuklir dapat dimanfaatkan sebagai alat tawar dalam negosiasi demi memenuhi kebutuhannya.⁹ Berdasarkan argumentasi ahli di atas, tulisan ini nantinya berupaya untuk menjelaskan perubahan perilaku Korea Utara dari segi persepsi Korea Utara terhadap identitas aktor di lingkungannya yang dianggap sebagai rival.

⁶ Reuters, "North Korean still working at main nuclear site, IAEA says," 23 November 2018, <<https://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-nuclear-iaea/north-korean-still-working-at-main-nuclear-site-iaea-says-idUKKCN1NS0HU>>, diakses pada 15 Januari 2019

⁷ T. Roehrig, "North Korea, Nuclear Weapons, and the Stability-Instability Paradox," *Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. 28, No.2, 2016, 195

⁸ Mun Suk Ahn, "What is the Root Cause of the North Korean Nuclear Program?," *Asian Affairs: An American Review*, Vol. 38, No. 4, 2011, 183.

⁹ Sung Chull Kim, "North Korea's Nuclear Doctrine and Revisionist Strategy." Dalam *North Korea and Nuclear Weapons*, ed. Sung Chull Kim dan Michael D. Cohen, (Washington DC: Georgetown University Press, 2017), 49.

Metode Penelitian

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menelaah perubahan perilaku Korea Utara terkait komitmennya dalam mengembangkan senjata nuklir. Pada proses pengumpulan data dan informasi, tulisan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal, portal berita, serta penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam menganalisis data dan informasi, tulisan ini menggunakan pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan oleh F. Kratochwill. Pendekatan ini menekankan bahwa aturan dan norma dapat menjadi landasan perilaku suatu aktor. Menurutnya, segala perilaku aktor dibentuk karena alasan praktis melalui proses pembelajaran dan interaksi antar-subjek yang dituntut oleh kepentingan, identitas, maksud, dan bahasa. Kedua proses tersebutlah yang menentukan apakah suatu negara memandang negara tertentu sebagai rival atau kawan.¹⁰

Diskusi dan Analisis Program Nuklir Korea Utara

Tulisan ini berangkat dari peristiwa perang antar dua Korea. Isu ini merupakan isu pertama penggunaan nuklir dalam menengahi permasalahan dua Korea. Perang dimulai ketika Korea Utara menginvasi Korea Selatan pada tahun 1950 yang bertujuan untuk menyatukan dua Korea ke dalam rezim komunis Korea Utara. Tentu saja, Korea Utara didukung oleh dua negara komunis, Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dalam melakukan upaya defensif terkait invasi.

Merespon masalah ini, Amerika yang saat itu dipimpin oleh Eisenhower

¹⁰ F. Kratochwill, "Rules, Norms, and Decision: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs." Dalam B.S. Hadiwinata, "Studi dan Teori Hubungan Internasional Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis" Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, 272

menyatakan bahwa Amerika tidak bisa hanya duduk diam tanpa melakukan hasil yang nyata.¹¹ Oleh sebab itu, Amerika menggunakan nuklir sebagai ancamannya terhadap Korea Utara untuk menghentikan tindakannya.¹² Keberhasilan usaha Eisenhower ini terlihat dengan adanya penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan di Panmunjom pada tahun 1953.¹³

Penggunaan ancaman Nuklir tersebut ternyata memunculkan keinginan Korea Utara untuk memiliki persenjataan nuklir.¹⁴ Diawali dengan mengikuti Konferensi Energi Nuklir pada tahun 1955, maka setahun kemudian Korea Utara mulai menandatangani perjanjian riset dengan Uni Soviet.¹⁵ Dalam perjanjiannya, Uni Soviet setuju untuk mendirikan pusat penelitian nuklir di Korea Utara yang berlokasi di tepian sungai Kuryong, sekitar 8 kilometer dari kota Yongbyon. Pengembangan teknologi nuklir semakin digalakkan oleh Korea Utara, karena adanya rasa tidak aman saat akhir pemerintahan Presiden Eisenhower, Amerika Serikat telah menempatkan 600 hulu ledak nuklir di Korea Selatan.¹⁶ Pada tahun 1961, dalam kongres keempat Partai Buruh Korea, Profesor To Sang Rok menyatakan Korea Utara harus segera mengembangkan kemampuan

pemberdayaan teknologi energi nuklir. Pernyataan ini kemudian terwujud pada tahun 1961 dengan rencana pembangunan kompleks penelitian nuklir di Yongbyon. Pada tahun 1962, Korea Utara mulai menginstal reaktor nuklir IRT-2000 yang di suplai oleh Uni Soviet. Masih pada tahun yang sama, Korea Utara juga mendirikan institusi penelitian nuklir di Yongbyon dan di Packh'on-kun. Pada tahun 1965, Korea Utara mulai mengoperasikan reaktor nuklir IRT-2000 di Yongbyon dan memulai operasi rutinnya pada tahun 1967.

Dengan berkembang pesatnya teknologi nuklir, Korea Utara mulai mengarahkan pengembangan teknologi nuklirnya menjadi senjata nuklir. Hal ini terlihat dari perintah yang diberikan oleh Kim Il Sung untuk mulai mempersenjatai misil Korea Utara dengan hulu ledak nuklir pada tahun 1966. Tidak berhenti di sana, Korea Utara juga mulai melakukan uji coba ledakan besar yang dibutuhkan sebagai salah satu mekanisme dari bom nuklir.¹⁷ Pada tahun 2006, Korea Utara akhirnya secara resmi mengumumkan uji coba senjata nuklir pertamanya melalui The Korean Central News Agency (KNCA).¹⁸

Gigihnya Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir pasti didorong oleh kepentingan yang krusial. Bila merujuk pada Scott Sagan, maka negara mengembangkan senjata nuklir dikarenakan tiga alasan yaitu untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, terlebih jika negara yang dianggap rival juga mengembangkan nuklir, kemudian nuklir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terakhir mengembangkan senjata nuklir

¹¹ Stephen E Ambrose, "Eisenhower: Soldier and President," (New York: Simon and Schuster, 2014), 295.

¹² Edward C. Keefer, "President Dwight D. Eisenhower and the End of the Korean War," *Diplomatic History*, Vol.10, No.3, (1986), 267.

¹³ Fu Ying, "The Korean Nuclear Issue : Past, Present, and Future: A Chinese Perspective," *Jonh L. Tronton China Center* (2017), 3.

¹⁴ M.J. Mazarr, "North Korea and the Bomb: A Case Study in Non-Proliferation," *New York: St. Martin Press* 1997, 17.

¹⁵ W.C. Clemens, "North Korea's Quest for Nuclear Weapons: New Historical Evidence," *Journal of East Asian Studies*, Vol. 10, No. 1, (2010),129.

¹⁶ R.S. Norris, W. N. Arkin, and W. Burr, "Where They Were," *The Bulletin of the Atomic Scientists*, Vol. 55, No. 6, 1999, 30

¹⁷ J.S. Bermudez, "North Korea's Nuclear Programme," *Jane's Intelligence Review*, Vol. 3, No. 9, 1991, 406

¹⁸ J. McLaughlin, "North Korea Nuclear Milestones-1962-2017," *Winconsin Project on Nuclear Arms Control*, 2017, (Online). <<https://www.wisconsinproject.org/north-korea-nuclear-milestones/>> diakses pada 18 Agustus 2018.

memberikan simbol normatif terkait identitas negara tersebut.¹⁹

Sementara Benjamin Habib dalam tulisannya membahas secara khusus tentang pengembangan nuklir oleh Korea Utara karena tiga alasan. Pertama, Korea Utara mengembangkan nuklir karena alasan keamanan nasional. Dalam hal ini secara gamblang, Korea Utara mengembangkan nuklir tidak hanya untuk menangkalkan tindakan Amerika Serikat tapi juga, untuk menangkalkan aktivitas militer yang membahayakan Korea Utara dari Korea Selatan.²⁰

Kedua, Korea Utara mengembangkan nuklir sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan ekonomi. Menurut Habib, kemampuan nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara dapat dijadikan alat tawar kepada dunia internasional untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak terpenuhi melalui bantuan dari dunia internasional. Adapun bantuan yang diberikan dari donor beragam, seperti bantuan makanan, penyediaan energi, pupuk, bantuan pembangunan dan dana tunai langsung yang paling banyak berasal dari Korea Selatan, Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat.²¹

Ketiga, Korea Utara mengembangkan nuklir untuk meningkatkan prestise Korea Utara di level internasional.²² Terkait hal ini, tentunya Korea Utara tidak akan dianggap remeh dalam pergaulan internasional sehingga dapat memberikan pengaruh dalam hubungannya dengan negara lain dan dapat lebih berani dalam bertindak. Hal ini terbukti meskipun Korea Utara telah berkomitmen untuk menghentikan program nuklirnya secara

penuh, tapi ternyata Korea Utara masih berupaya untuk mengembangkan nuklirnya.

Sagan dan Habib telah menjelaskan secara ringkas alasan Korea Utara bersikap terkait pengembangan nuklirnya. Namun, bila ditinjau kembali, perubahan sikap Korea Utara sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar Korea Utara yang di dalamnya terdapat aktor-aktor yang intens berinteraksi dengan Korea Utara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Norma Denuklirisasi Terhadap Korea Utara

Sebelum membahas lebih jauh, terdapat dua istilah yang harus diperjelas maknanya terlebih dahulu, yaitu pelucutan nuklir dan denuklirisasi. Mengutip dari Gastelum (2012), pelucutan nuklir adalah suatu proses mengurangi jumlah dan/atau kapabilitas militer, senjata, dan kekuatan nuklir, sedangkan, denuklirisasi adalah upaya untuk mengeliminasi infrastruktur yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata nuklir.

Terkait nuklir Korea Utara, dunia internasional tidak hanya menginginkan pengurangan kuantitas, melainkan menghentikan secara total segala aktivitas yang berhubungan dengan program nuklirnya. Hal ini diupayakan oleh dunia internasional melalui rezim NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) yang dibentuk pada tahun 1968 sehingga larangan untuk memiliki nuklir tidak hanya sebagai sebuah norma, tetapi sudah bersifat legal.²³ Inti dari rezim ini adalah mengatur negara-negara pemilik senjata nuklir yang sah (*Nuclear Weapon States: NWS*) yang terdiri dari Amerika Serikat, Cina, Inggris, Rusia, dan Perancis, untuk tidak menyebarkan senjata nuklirnya pada negara lain; sementara negara bukan pemilik

¹⁹ S. Sagan, "Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb," *International Security* Vol. 21, No. 3 (1997), 55.

²⁰ B.Habib, "North Korea's Nuclear Wapons Programme and the maintenance of the Songun System," *The Pacific Review*, Vol 24, No. 1 (Maret 2011), 47.

²¹ B. Habib, 52-54.

²² B.Habib, 52.

²³ Robert Graham Jr., "The Nuclear Tipping Point: Why States Reconsider Their Nuclear Choices," Ed. by Kurt M. Campbell, Robert J. Einhorn, and Mitchell B. Reiss, (Washington: Brookings Institution Press, 2004).

senjata nuklir (*Non Nuclear Weapon States: Non-NWS*) berjanji untuk tidak memilikinya, sebagai gantinya setiap negara boleh memiliki nuklir asalkan didasari oleh tujuan damai seperti pemanfaatan teknologi nuklir sebagai energi. Perihal ini mungkin bila merujuk pada Pasal 1, 2, dan 3 dalam NPT yakni negara yang bersangkutan bersedia untuk mengizinkan IAEA melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap program nuklir yang dilakukan.

Korea Utara bergabung menjadi anggota rezim NPT pada tahun 1985, maka dengan ini Korea Utara sebagai Non- NWS menyatakan tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan akan terbuka jika ada inspeksi ke reaktor nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara.²⁴ Tujuh tahun berselang, tahun 1992, Korea Utara diminta untuk berkomitmen terhadap *Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula*. Perjanjian yang muncul karena kecurigaan terhadap Korea Utara yang mengembangkan persenjataan nuklir di Yongbyon serta tidak mengizinkan IAEA untuk melakukan inspeksi fasilitas nuklir tersebut.

Menanggapi hal ini, Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Korea Utara yang menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan *The 1994 Agreed Framework*. Kesepakatan ini berisi tentang serangkaian tindakan yang harus dilakukan kedua belah pihak. Dalam kerangka ini, Korea Utara tetap berada dalam rezim NPT, menghentikan dan membongkar fasilitas yang berkaitan dengan nuklir. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat setuju untuk menyediakan Reaktor Air, mengirimkan minyak, dan mempererat hubungan diplomatik.²⁵ Kesepakatan ini

merupakan suatu upaya denuklirisasi Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Meskipun demikian, upaya ini justru gagal ditandai dengan dua hal diantaranya Korea Utara ternyata masih melanjutkan program nuklirnya secara diam-diam ditengah suplai material yang diberikan Amerika Serikat dan Korea Utara memutuskan keluar dari rezim NPT pada tahun 2003. Keputusan ini tentu bagi Korea Utara memperlihatkan kegigihan dan keseriusan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Namun, bagi kelompok NWS, fakta ini dianggap sebagai gangguan dalam stabilitas keamanan dunia internasional.

Sebagai bentuk respon, Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan membentuk suatu forum multilateral yang dikenal *The Six Party Talk* pada tahun 2003. Forum ini juga mengikutsertakan Korea Utara sebagai anggota. Forum ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara, tapi juga hendak untuk menciptakan perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea. Dalam praktiknya, agak sulit untuk dijalankan sehingga forum ini mengalami kebuntuan.

Namun, pada tahun 2005, forum ini sedikit tercerahkan dengan pengumuman Korea Utara terkait komitmennya untuk menghentikan program nuklirnya, sebagai imbalan Amerika Serikat berjanji untuk tidak menyerang Korea Utara.²⁶ Kembali, Korea Utara melanggar komitmennya dengan melakukan uji coba nuklir pertama kali pada tahun 2006.

Menanggapi hal tersebut, *The Six Party Talk* mengadakan pertemuan untuk membahas aktivitas uji coba nuklir Korea Utara tersebut. Pada tahun 2007, Korea

²⁴ McLaughlin, "North Korea Nuclear Milestones-1962-2017."

²⁵ R. Carlin dan J.W. Lewis, "Negotiating with North Korea; 1992-2007," Center for International Security and Cooperation, Freeman Spogli Institute

for International Studies, Stanford University (2008), 26-29.

²⁶ CFR, "North Korea Nuclear Negotiations 1985-2018," 3 Oktober 2018,

<<https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations>> diakses pada 25 Agustus 2018

Utara dan lima negara menyepakati aksi bahwa lima negara tersebut akan memberikan bantuan ekonomi, membangun perdamaian di Semenanjung, dan normalisasi hubungan diplomatik dengan lima negara tersebut dengan Korea Utara, apabila Korea Utara menghentikan aktivitas nuklir dan membongkar fasilitas reaktor nuklir 5 MW di bawah pengawasan IAEA.²⁷ Kesepakatan tersebut seperti memberikan angin segar terhadap solusi damai terkait isu nuklir tersebut, sebab Korea Utara mulai menutup fasilitas nuklir utamanya di Yongbyon. Kembali, komitmen Korea Utara bersifat semu. Dibuktikan dengan dilakukannya uji coba nuklir yang kedua pada tahun 2009.

Uji coba ini diluncurkan setelah Korea Utara tidak lagi ikut dalam forum multilateral terkait denuklirisasi. Sejak saat itu, Korea Utara kian aktif dalam mengembangkan dan memperkuat senjata nuklirnya. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian uji coba ketiga, keempat, dan kelima yang dilakukan pada 12 Februari 2013, 6 Januari 2016, 9 September 2016, dan terakhir uji coba yang daya ledak dan jangkanya lebih kuat pada 3 September 2017.²⁸ Aktivitas uji coba nuklir Korea Utara yang terakhir menggemparkan dunia internasional mengingat daya ledaknya dapat menimbulkan gempa 6.3 SR dan daya jangkanya sampai ke Alaska.

Aktifitas Korea Utara ini dikhawatirkan dapat mengacaukan tatanan yang ada dengan melihat perilaku Korea Utara yang dapat mengancam eksistensi negara yang dapat dijangkau dengan misil balistiknya. Beragam respon bermunculan hingga beberapa bulan kemudian yaitu

pada tanggal 27 April 2018 menjadi hari penting terkait isu denuklirisasi Korea Utara. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, menyatakan komitmennya untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Panmunjom.

Pertemuan yang di adakan di Panmunjom ini menarik perhatian masyarakat internasional. Sebab, dilakukan tidak lama setelah hubungan Korea Utara dan Selatan dianggap berada pada titik paling rendah. Di samping itu, pertemuan diadakan tidak lama setelah Korea Utara sukses melakukan uji senjata nuklirnya yang keenam serta peluncuran misil oleh Korea Utara.²⁹

Harapan denuklirisasi Korea Utara semakin menguat saat pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Kim Jong Un diadakan pada tanggal 12 Juni 2018 di Pulau Sentosa, Singapura. Pertemuan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam serangkaian kisah pengembangan nuklir Korea Utara. Tidak hanya karena membicarakan kelanjutan program nuklir Korea Utara, tetapi juga merupakan pertemuan pertama kali antara kedua pemimpin negara tersebut.

Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang terdiri dari empat hal penting, diantaranya (1) Amerika Serikat dan Korea Utara sepakat membangun hubungan bilateral yang baik; (2) Kedua negara akan berupaya untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea; (3) Berkaitan dengan Deklarasi Panmunjom, Korea Utara akan berupaya untuk melakukan denuklirisasi secara penuh; terakhir (4) Amerika Serikat

²⁷ Park Chang-Kwoun, "Rethinking North Korea's Denuclearization: Approaches and Strategies," (Singapore: Stallion Press, 2015), 23-24

²⁸ ACA, "Fact Sheet & Briefs, Nuclear Testing and Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) Timeline," 2018, <<https://www.armscontrol.org/taxonomy/term/2>> diakses pada 25 Agustus 2018

²⁹ The Guardian, "North and South Korean Leaders promise 'lasting peace' for peninsula," 27 April 2018, <<https://www.theguardian.com/world/2018/apr/27/north-south-korea-summit-leaders-promise-lasting-peace-denuclearisation-kim-jong-un-moon-jae-in>>, diakses pada 25 Agustus 2018

dan Korea Utara sepakat untuk mengembalikan semua tahanan perang (*Person of War: POW*) yang tersisa. Dalam artikel tambahan dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk menjamin keamanan Korea Utara. Negosiasi ini kemudian akan dilanjutkan kembali melalui kunjungan Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo.³⁰

Pertemuan sejarah ini ternyata hampir sama dengan yang sebelumnya. Lagi-lagi, Korea Utara mengingkari pernyataan bersama yang sudah ditandatangani dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan bahwa dilaporkan Korea Utara masih melanjutkan program nuklirnya. Hal ini terjadi, karena menurut Korea Utara yang disampaikan melalui Korean Central News Agency, denuklirisasi di Semenanjung Korea yang mereka maksud adalah penghapusan semua sumber ancaman nuklir tidak hanya dari Korea Utara dan Selatan, tetapi juga dari negara tetangga yang berada di wilayah Semenanjung. Jadi, jika Amerika Serikat tidak menutup semua program nuklir di area tersebut, Korea Utara tidak akan menghentikan programnya.³¹ Tentu saja bagi Korea Utara ini penting mengingat negara di wilayah Asia Timur memiliki nuklir.

Analisis Perubahan Sikap Korea Utara

Sebelumnya telah dipaparkan mengenai rencana program nuklir Korea yang telah dimulai semenjak tahun 1950-an dibawah rezim Kim Il Sung serta upaya

yang telah dilakukan dalam merespon aktivitas pengembangan nuklir Korea Utara. Fenomena ini seperti membentuk pola-pola dalam kisah pengembangan nuklir Korea Utara yaitu, ketika Amerika Serikat dan negara NWS lainnya melakukan upaya untuk menghentikan program nuklir Korea Utara dengan memberikan beragam tawaran kesepakatan yang menguntungkan Korea Utara, maka Korea Utara akan menerima tawaran tersebut dan tidak lama berselang, Korea Utara melanggar kesepakatan tersebut.

Bila merujuk pada pandangan konstruktivisme, menurut Kratochwill, tindakan suatu aktor tidak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan, namun, telah dipengaruhi oleh identitas aktor tersebut serta lingkungan sekitar aktor yang kemudian membentuk perilaku aktor melalui pola-pola yang dapat dipelajari. Melalui interaksi tersebut, suatu negara dapat memahami apakah aktor negara lain adalah kawan atau lawan dilihat dari identitasnya.³² Alexandrov dalam tulisannya, mendefinisikan identitas negara adalah suatu representasi dari negara yang diterima secara luas, yang berkaitan terhadap hubungan dengan negara lain, serta keyakinan yang sesuai dengan perilaku, hak, dan tanggung jawabnya.³³ Di samping itu, menurut Reus-Smit, identitas terbentuk dari norma, nilai, dan ide yang dilembagakan dari lingkungan sosial tempat negara bertindak sehingga kepentingan adalah adalah refleksi dari identitas yang diperoleh dari proses komunikasi dan pengalaman.³⁴ Oleh sebab

³⁰ CNBC, "Trump says North Korea will keep its promises, and the US will stop war games," Edisi 12 Juni 2018, <<https://www.cnn.com/2018/06/12/trump-and-kim-sign-agreement-document-after-summit-in-singapore.html>>, diakses pada 18 Januari 2019.

³¹ The New York Times, "North Korea says it won't denuclearize until US removes Threat," Edisi 20 Desember 2018, <<https://www.nytimes.com/2018/12/20/world/asia/north-korea-denuclearization.html>>, diakses pada 18 Januari 2019.

³² F. Kratochwill, "Rules, Norms, and Decision: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs." Dalam B.S. Hadiwinata, 272-273.

³³ Maxym Alexandrov, "The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis," *Journal of International Development and Cooperation*, Vol. 10, No. 1, 2003, 39.

³⁴ Christian Reus-Smit, "Constructivism." Dalam Mag. Enes Bayraklı, "Turkish Foreign Policy in Transition: The Emergence of Kantian Culture in

itu, menurut Bloom, identitas nasional sering memberikan pengaruh terhadap tindakan suatu negara di dalam hubungan internasional.³⁵ Pendapat para ahli ini tentunya memberikan gambaran awal bahwa identitas Korea Utara akan berhubungan dengan perilakunya di kawasan.

Berbicara tentang identitas Korea Utara, maka akan berkaitan dengan ideologinya. Berdasarkan konstitusi Korea Utara, artikel 3, maka aktivitas Korea Utara akan dilandaskan atas prinsip “Juche” dan “Songun”. Prinsip “Juche” dikemukakan pertama kali oleh Kim Il Sung yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kemandirian. Korea Utara menurunkan prinsip ini ke dalam tiga bidang diantaranya politik, ekonomi, dan pertahanan.³⁶

Pada aspek politik merujuk pada cita-cita Korea Utara yang akan mengembangkan diplomasi politik independen tanpa tunduk pada kekuatan besar. Sementara pada bidang ekonomi, Korea Utara tidak akan mengabaikan perkembangan teknologi serta bila perlu akan terlibat dalam perdagangan internasional. Aspek terakhir yang tak kalah penting adalah kemandirian dalam hal pertahanan yang memang sudah dipraktikkan dari awal. Fenomena belum berakhirnya perang Korea, membuat Korea Utara merasa tidak aman, melihat fakta lebih dari 17.000 pasukan Amerika Serikat masih berada di Korea Selatan, sementara Pasukan Uni Soviet yang berperang bersama Korea Utara segera mundur setelah negara Korea Utara terbentuk, begitu pula dengan Pasukan Cina yang mundur pada tahun 1958.³⁷ Di samping itu, fenomena runtuhnya Tembok Berlin yang

mengakhiri eksistensi komunis Uni Soviet dan terbukanya Cina terhadap kapitalisme, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Korea Utara. Maka dari itu, fakta ini semakin mendorong Korea Utara untuk meningkatkan pertahanan demi melindungi diri.

Masalah keamanan ini juga melandasi tercetusnya prinsip “Songun” yang melengkapi prinsip “Juche”. Prinsip yang dicetuskan oleh Kim Jong Il sering diartikan sebagai kebijakan yang mengutamakan militer (*military-first politics*). Melalui prinsip ini, diharapkan terwujudnya Korea Utara sebagai negara yang kuat dan berkuasa.³⁸

Berangkat dari ide “Juche” dan “Songun” inilah yang melandasi Korea Utara bertindak di kawasan. Maka, tentu saja Korea Utara diberi label sebagai negara yang ofensif, sebab setiap perilakunya menimbulkan protes dari aktor-aktor yang ada di kawasan. Terkait nuklir sendiri, dengan adanya norma denuklirisasi yang sudah legal, Korea Utara memiliki identitas sebagai negara Non-NWS, yang dalam praktiknya Korea Utara tidak boleh mengembangkan senjata nuklir.

Namun, Korea Utara tetap kekeuh dalam mengembangkannya nuklir meskipun telah diberikan insentif oleh NWS yakni Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis dan Non-NWS yaitu Korea Selatan. Aktor-aktor tersebut merupakan aktor yang memang aktif dan intens berinteraksi dengan Korea Utara. Bila dikaji kembali, sebagai negara NWS, dalam praktiknya sangat wajar bila negara tersebut berupaya untuk menghentikan Korea Utara karena dari segi identitas negara tersebut dengan Korea Utara sangatlah berbeda, maka perbedaan identitas inilah yang membuat hubungan diantara mereka disebut sebagai lawan atau rival. Sementara, Korea Selatan yang memiliki identitas sebagai negara Non-

Turkish Foreign Policy (A holistic Constructivist Approach,” (PhD diss., Universitat Wien, 2012, 18.

³⁵ Maxym Alexandrov, 37.

³⁶ Atsuhito Isozaki, “Understanding the North Korean Regime,” Washington: Wilson Center, 2017, 15-16

³⁷ Atsuhito Isozaki, 16.

³⁸ Atsuhito Isozaki, 16.

NWS sama dengan Korea Utara, namun ketegangan masih menyelimuti kedua negara korea tersebut sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan lawan atau rival. Hal ini disebabkan keduanya memiliki sejarah yang menempatkan keduanya dalam posisi yang bertentangan seperti pisahnya kedua negara karena berbedanya ideologi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perbedaan ini juga akan berimplikasi terhadap pandangan Korea Utara terhadap Korea Selatan, misalnya dengan berlandaskan prinsip “Juche,” atau kemandirian, Korea Utara melihat bahwa Korea Selatan memiliki ketergantungan dengan negara barat berdasarkan nilai dan gaya hidup konsumerisme yang mereka adopsi. Dengan demikian, jika hubungan yang terjalin adalah hubungan rival, maka apapun yang dilakukan oleh Korea Selatan akan menimbulkan kekhawatiran bagi Korea Utara, begitupun sebaliknya.

Tidak jauh berbeda dengan persepsi Korea Utara terhadap Jepang dan Amerika Serikat. Persepsi rival Korea Utara terhadap Jepang disebabkan karena alasan historis yaitu Korea Utara dulunya merupakan salah satu negara koloni Jepang sehingga sentimen anti-Jepang berkembang di Korea Utara. Sementara itu, bagi Korea Utara, hubungan rivalnya dengan Amerika Serikat terjadi tidak hanya karena status Amerika Serikat sebagai NWS, melainkan juga karena Amerika Serikat menjadi negara aliansi bagi Jepang dan Korea Selatan di kawasan, dikarenakan Perang Korea yang belum usai. Masih adanya ranjau darat Amerika Serikat yang tersisa di wilayah Semenanjung Korea menjadi bukti terkait dukungannya bagi Korea Selatan.

Hal menarik justru terkait hubungan antara Cina dan Korea Utara. Keduanya memiliki hubungan yang baik sejak bertahun-tahun lalu. Ketika Korea Utara diisolasi oleh dunia internasional, Cina hadir sebagai negara yang sering memberikan bantuan terhadap Korea Utara. Meskipun demikian, bila merujuk pada

identitas Cina sebagai NWS dalam rezim NPT, maka hubungan antara Cina dan Korea Utara yang terjalin adalah rival.

Terkait fenomena pengembangan program nuklir misil balistik Korea Utara pada tahun 2017, aktor-aktor rival tersebut memberikan reaksi keras terhadap Korea Utara. Hal ini seperti Korea Selatan yang merespon dengan serangkaian latihan militer. Berdasarkan pernyataan menteri pertahanan Korea Selatan, latihan militer di tujukan untuk memperlihatkan kemampuan Korea Selatan untuk “memusnahkan” rezim Kim Jong Un.³⁹ Kemudian, Amerika Serikat lewat Sekretaris Pertahanan, James Mattis, menyatakan segala tindakan Korea Utara yang dianggap membahayakan Amerika Serikat akan di tanggap dengan respon militer yang masif, disamping itu Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB juga mengutarakan bahwa tindakan Korea Utara tersebut sama saja dengan permohonan untuk terjadinya perang.⁴⁰ Cina pun juga memberikan penolakan terhadap program nuklir Korea Utara yang disampaikan lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya, dan bertentangan dengan keinginan komunitas internasional, dan tidak akan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Cina.⁴¹ Respon yang muncul dari aktor-aktor di kawasan tersebut memperlihatkan adanya penentangan terhadap perilaku Korea Utara.

Kesimpulan

Terkait norma dan aturan kepemilikan nuklir, sebagai Non-NWS, Korea Utara tidak berhak mengembangkan

³⁹ CW39, “Seoul steps up military response to North Korea’s nuclear test,” Edisi 4 September 2017, <<https://cw39.com/2017/09/04/seoul-steps-up-military-response-to-north-koreas-nuclear-test/>>, diakses pada 25 Januari 2018.

⁴⁰ CW39, “Seoul steps up military response to North Korea’s nuclear test.”

⁴¹ CW39, “Seoul steps up military response to North Korea’s nuclear test.”

senjata nuklir berdasarkan pada rezim NPT. Namun, keluarnya Korea Utara dari rezim NPT menegaskan bahwa Korea Utara tidak ingin prilakunya diatur oleh rezim nuklir tersebut, karena aturan tersebut sejalan dengan negara-negara yang dianggap rival oleh Korea Utara. Meskipun Korea Utara diberikan sanksi, bantuan ekonomi, serta diikat dalam suatu kesepakatan oleh NWS, Korea Utara tetap melanjutkan program senjata nuklirnya. Hal ini disebabkan oleh Korea Utara yang mempersepsikan Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan sebagai rival karena perbedaan identitas yang dimiliki antar negara tersebut dengan Korea Utara. Persepsi ini menjadikan Korea Utara merasa tidak aman di kawasan, maka untuk mempertahankan dirinya, Korea Utara tetap melanjutkan program senjata nuklirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Isozaki, "Understanding the North Korean Regime," Washington: Wilson Center, 2017
- ACA, "Fact Sheet & Briefs, Nuclear Testing and Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) Timeline," 2018, <<https://www.armscontrol.org/taxonomy/term/2>> diakses pada 25 Agustus 2018
- B.Habib, "North Korea's Nuclear Wapons Programme and the maintenance of the Songun System," *The Pacific Review*, Vol 24, No. 1 (Maret 2011), pp 43-64.
- C. Reus- Smit, "Constructivism." Dalam Mag. Enes Bayraklı, "Turkish Foreign Policy in Transition: The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy (A holistic Constructivist Approach)," (PhD diss., Universitat Wien, 2012)
- CFR, "North Korea Nuclear Negotiations 1985-2018," 3 Oktober 2018, <<https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations>> diakses pada 25 Agustus 2018
- CNBC, "Trump says North Korea will keep its promises, and the US will stop war games," Edisi 12 Juni 2018, <<https://www.cNBC.com/2018/06/12/trump-and-kim-sign-agreement-document-after-summit-in-singapore.html>>, diakses pada 18 Januari 2019.
- CNN, "Latest North Korea Missile Test Renews US Talk of Military Option," Edisi 16 September 2017, <<https://edition.cnn.com/2017/09/16/politics/north-korea-missile-test/index.html>>, diakses pada 4 Agustus 2018.
- CW39, "Seoul steps up military response to North Korea's nuclear test," Edisi 4 September 2017, <<https://cw39.com/2017/09/04/seoul-steps-up-military-response-to-north-koreas-nuclear-test/>>, diakses pada 25 Januari 2018.
- E. C. Keefer, "*President Dwight D. Eisenhower and the End of the Korean War*," *Diplomatic History*, Vol.10, No.3, (1986), pp 267-289.
- F. Kratochwill, "Rules, Norms, and Decision: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs." Dalam B.S. Hadiwinata, "Studi dan Teori Hubungan Internasional Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis" Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- F. Ying, "The Korean Nuclear Issue : Past, Present, and Future: A Chinese Perspective," *Jonh L. Tronton China Center* (2017), pp 1-24.
- Hitoshi Tanaka, "Five Factors That Could Lead to War with North Korea," *East Asia Insights*, September 2017, pp 1-4.
- J. McLaughlin, "North Korea Nuclear Milestones-1962-2017," *Winconsin Project on Nuclear Arms Control*, 2017. <<https://www.wisconsinproject.org/north-korea-nuclear-milestones/>> diakses pada 18 Agustus 2018.
- J.K. Warden, "North Korea's Nuclear Posture An Evolving Challenge for US Deterrence," *Proliferation Papers*, Ifri, Maret 2017
- J.S. Bermudez, "North Korea's Nuclear Programme," *Jane's Intelligence Review*. Vol. 3, No. 9, 1991, pp. 404-412
- M. Alexandrov, "The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis," *Journal of International Development and Cooperation*, Vol. 10, No. 1, 2003, pp 33-46
- M. S. Ahn, "What is the Root Cause of the North Korean Nuclear Program?," *Asian Affairs: An American Review*, Vol. 38, No. 4, 2011, pp. 175-187
- M.J. Mazarr, "North Korea and the Bomb: A Case Study in Non-Proliferation," New York: St. Martin Press, 1997

- P. Chang-Kwoun, "Rethinking North Korea's Denuclearization: Approaches and Strategies," (Singapore: Stallion Press, 2015).
- R. Carlin dan J.W. Lewis, "Negotiating with North Korea; 1992-2007," Center for International Security and Cooperation, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University (2008), pp 1-51.
- R. Graham Jr., "The Nuclear Tipping Point: Why States Reconsider Their Nuclear Choices," Ed. by Kurt M. Campbell, Robert J. Einhorn, and Mitchell B. Reiss, (Washington: Brookings Institution Press, 2004).
- R. L. Gallucci, "North Korea, Iran, and the Proliferation of Nuclear Weapons: The Threat, U.S. Policy, and the Prescription ... and the India Deal," ed. Stephen Van Evera (Cambridge, MA: The Tobin Project, 2006)
- R.S. Norris, W. N. Arkin, and W. Burr, "Where They Were," *The Bulletin of the Atomic Scientists*, Vol. 55, No. 6, 1999, pp. 26-35
- Reuters, "North Korean still working at main nuclear site, IAEA says," 23 November 2018, <<https://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-nuclear-iaea/north-korean-still-working-at-main-nuclear-site-iaea-says-idUKKCN1NS0HU>>, diakses pada 15 Januari 2019
- S. E. Ambrose, "Eisenhower: Soldier and President," (New York: Simon and Schuster, 2014)
- S. Sagan, "Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb," *International Security* Vol. 21, No. 3 (1997), pp 54-86.
- S.C. Kim, "North Korea's Nuclear Doctrine and Revisionist Strategy." Dalam *North Korea and Nuclear Weapons*, diedit oleh Sung Chull Kim dan Michael D. Cohen, (Washington DC: Georgetown University Press, 2017)
- T. Roehrig, "North Korea, Nuclear Weapons, and the Stability-Instability Paradox," *Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. 28, No. 2, 2016, pp. 181-198
- The Guardian, "North and South Korean Leaders promise 'lasting peace' for peninsula," 27 April 2018, <<https://www.theguardian.com/world/2018/apr/27/north-south-korea-summit-leaders-promise-lasting-peace-denuclearisation-kim-jong-un-moon-jae-in>>, diakses pada 25 Agustus 2018
- The New York Times, "North Korea says it won't denuclearize until US removes Threat," Edisi 20 Desember 2018, <<https://www.nytimes.com/2018/12/20/world/asia/north-korea-denuclearization.html>>, diakses pada 18 Januari 2019.
- W.C. Clemens, "North Korea's Quest for Nuclear Weapons: New Historical Evidence," *Journal of East Asian Studies*, Vol. 10, No. 1, 2010, pp.127-154